

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAYARAN JASA TAKSI
DENGAN SISTEM ARGO**

(Studi Kasus pada Taksi Trans Lampung, Bandar Lampung)



SKRIPSI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung.

Anggun Destiani

142130088

Pembimbing I : Dr. Jayusman, S.Ag.

Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

1439 H / 2018 M

ABSTRAK

Jasa transportasi digunakan oleh semua kalangan masyarakat untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan rutinitas setiap hari. Taksi Trans Lampung menggunakan sistem pembayaran argo yang telah ditetapkan diawal ketika membuka pintu taksi hal ini sangatlah berbeda ketika memesan dengan menggunakan aplikasi seperti yang marak sekarang ini yaitu Grab, Gocar dan lain-lainnya. Rumusan masalah penelitian adalah Bagaimana sistem penetapan argo pada taksi Trans Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan argo pada taksi Trans Lampung.

Tujuan dan kegunaan penelitian ini untuk mengetahui penetapan argo pada taksi Trans Lampung dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan argo pada taksi Trans Lampung. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang bersifat jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil temuan lapangan didapatkan jawaban yang mengarah kepada penyalahgunaan dan permainan dalam pembayaran dengan sistem argo yang dilakukan oleh pihak supir yang tidak bertanggung jawab. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan supir taksi Trans Lampung yaitu tidak adanya tarif tunggu yang dibuat oleh pihak perusahaan tetapi lapangan para supir membuat tarif tunggu yang mengakibatkan konsumen merasa rugi karena tarif yang tertera pada mesin argo tidak sesuai yang dibayar sehingga konsumen membayar lebih dari harga yang tertera di tarif. Perusahaan taksi Trans Lampung tidak mengikuti peraturan-peraturan tentang penetapan tarif dasar dan tarif bawah yang telah dibuat oleh pemerintah dan telah di sahkan oleh Gubernur Lampung tentang adanya pembayaran tarif dengan sistem argo, sehingga terjadinya kecurangan, kecurangan tersebut tidaklah dilaporkan kepada pihak perusahaan sehingga pihak perusahaan tidak dapat menindak oknum-oknum yang melakukan kecurangan, hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dari pihak perusahaan yang terjadi di lapangan.

Pada tinjauan hukum Islam hal ini bertentangan dengan surat An-Nissa ayat [29] yaitu janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan harus mengutamakan prinsip-prinsip hukum Islam dan etika dalam berbisnis. Hal ini dilakukan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam hal pembayaran dengan menggunakan jasa taksi dengan sistem argo, dan mentaati peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah yang bertentangan dengan huk



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PEMBAYARAN JASA TAKSI DENGAN SISTEM
ARGO (Studi Kasus pada Taksi Trans Lampung, Bandar
Lampung)

Nama : Anggun Destiani

NPM : 142130088

Jurusan : Mu'amalah

Fakultas : Syari'ah

DISETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Jayusman, S.Ag.

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

NIP:197411062000031002

NIP:197304142000032002

Ketua Jurusan Siyasa

Dr. H. A. Khumaedi Ja'far, S.Ag. M.H.

NIP:197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAYARAN JASA TAKSI DENGAN SISTEM ARGO (Studi Kasus pada Taksi Trans Lampung, Bandar Lampung)”** disusun oleh Anggun Destiani, NMP. 1421030088, Program Studi: Muamalah, telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal:

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

(.....)

Sekretaris : Arif Fikri., S.H.I., M.Ag.

(.....)

Penguji I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

(.....)

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

(.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002**

MOTO

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَجِرُّهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ ﴿٣٦﴾

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."¹ (Q.S. al-Qasas: 26)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahanny, Fajar Mulya, Surabaya, 2002, h. 26.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan karunia, berkah, nikmat, dan rahmat-Nya, rasa sayang dan perlindungan-Nya yang selalu mengiringi langkah kaki ini. Maka dengan ketulusan hati dan penuh kasih sayang, kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang tersayang:

- a. Kepada orang tua yang saya banggakan Ayah Muchamad Ghozali, dan Mamah tersayang Ansani, S.pd. yang telah melindungi, mengasuh, menyayangi, dan mendidik saya sejak dari kandungan hingga dewasa serta senantiasa mendoa'kan dan sangat mengharapkan keberhasilan saya untuk menjadi anak yang dibanggakan. Dan berkad doa'nyalah penulis dapat menyelesaikan kuliah ini. Semoga semua ini merupakan hadiah terindah untuk Ayah dan Mamah untuk keberhasilan yang akan datang.
- b. Yang saya sayangi dan saya banggakan kakak Angga Rizki Pratama A,Md yang selalu mendoakan dan memberi semangat motivasi bagi keberhasilan saya selama studi.
- c. Terkhusus untuk Almamaterku (UIN RadenIntan Lampung) yang telah memberikan pengalaman yang berharga untuk membuka pintu dunia masa depan dan kehidupan yang akan datang.

RIWAYAT HIDUP

Alhamdulillah penulis dianugerahkan nama yang baik dari kedua orang tua dengan nama Anggun Destiani, dilahirkan di Bogor 12 Desember 1995, merupakan Putri kedua dari dua bersaudara pasangan dari Bapak Muchamad Ghozali dan Ibu Ansani, Spd.

Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan: Pendidikan TK Al-Quran Metro pada tahun 2001-2002, Pendidikan SD N 03 Palapa Tanjung Karang pada tahun 2002-2008, kemudian melanjutkan SMP N 9 Bandar Lampung pada tahun 2008-2011, selanjutnya SMA N 8 Bandar Lampung pada tahun 2011-2014 dan Alhamdulillah melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi pada UIN Raden Intan Lampung 2014-2018.

Riwayat Organisasi penulis yang pernah diikuti: OSIS SMP N 9 Bandar Lampung, Organisasi Palang Merah Remaja (PMR) di SMP N 9 Bandar Lampung, Organisasi Seni Tari Modern di SMA N 8 Bandar Lampung dan pernah mengikuti perlombaan Tingkat Provinsi di Acara *Developmental Basketball League* (DBL) Lampung.

Riwayat Prestasi yang Pernah diraih: Meraih 15 Besar Finalis di Ajang Pemilihan Muli Menkhanai Kota Bandar Lampung.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Jasa Taksi Dengan Sistem Argo pada Taksi Trans Lampung dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu Syariah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa diucapkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag.M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Dr. H.A. Khumaidi Ja'far, S.Ag.,M.H., sebagai ketua jurusan/prodi Muamalah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya, atas petunjuk dan arahan yang diberikan selama masa pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Jayusman, M. Ag dan Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si., masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan

waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.

4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Seluruh staff akademik dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik dan mendapatkan informasi serta sumber referensi kepada penulis.
6. Achmad Junaedy Muchtar sebagai teman dekat saya yang telah memberikan semangat serta dukungan motivasi kepada saya sehingga terpenuhnya skripsi ini.
7. Sahabat serta teman-teman grup pejuang skripsi, serta sahabat yang berbeda universitas tetapi tetap mendukung dan memberi arahan kepada saya dari jauh Shafyra Hanum, Putri Handayani, Rini Utami, Dita Putri, Rizsty Dwi, Mona Desbrigita, Astri Ayu Andari, yang telah membawa penulis hingga dapat melanjutkan di bangku perkuliahan ini. Terimakasih untuk Indah Hermiati atas bantuannya dalam penelitian skripsi ini hingga terselesaikan
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Fakultas Syariah Jurusan Muamalah khusus nya telah ikut membantu proses penyelesaian skripsi ini.
9. Kepala Pimpinan Taksi Trans Lampung yang telah membantu dalam proses penelitian sampai penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi Ini masih jauh dari dari kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena kemampuan waktu yang dimiliki. Untuk itu

kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi amal jariah dan ilmu yang bermanfaat bagi siapapun.

Bandar Lampung, 10 April 2018



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB 1 PENDAHULUAN

A. PENEGASAN JUDUL	1
B. ALASAN MEMILIH JUDUL	2
C. LATAR BELAKANG MASALAH.....	4
D. RUMUSAN MASALAH.....	11
E. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	12
F. METODE PENELITIAN	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. JASA TAKSI MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM	18
1. PENGERTIAN PEMBAYARAN JASA TAKSI	21
2. DASAR HUKUM PEMBAYARAN JASA TAKSI	32
3. RUKUN DAN SYARAT PEMBAYARAN DALAM ISLAM.....	35
4. MACAM-MACAM AKAD PEMBAYARAN.....	41
B. PENGERTIAN TENTANG ARGO	47
1. DASAR HUKUM PENETAPAN ARGO	47
2. PENETAPAN ARGO SECARA UMUM	50
3. PERATURAN-PERATURAN TENTANG PENETAPAN ARGO.....	55

BAB III METODE PENELITIAN

A. PAPARAN DATA PROFIL PERUSAHAAN TAKSI TRANS LAMPUNG	61
a. Sejarah Taksi Trans Lampung	61
b. Visi, Misi, dan tujuan Taksi Trans Lampung.....	63
c. Logo Taksi Trans Lampung	63
d. Struktur Kerja Kepemimpinan	64
e. Lokasi Perusahaan	65
f. Produk atau awak Kendaraan yang dipakai	65
B. Pelaksanaan Tarif Argo Pada Taksi Trans Lampung.....	65
C. Penelitian Metode Pengumpulan Data Taksi Trans Lampung.....	67

BAB VI ANALISIS DATA

- A. Sistem Pelaksanaan Argo PadaTaksi Trans Lampung 71
- B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Jasa Taksi Dengan Sistem Argo Pada Taksi Trans Lampung 75

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 79
- B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara rinci skripsi ini guna untuk menghindari kesalah pahaman mengenai maksud dan tujuan penulis serta lebih memahami dan memudahkan dalam membuat skripsi tentang tinjauan hukum Islam tentang pembayaran jasa taksi dengan sistem argo, maka akan diberi penjelasan yang singkat beberapa kata yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Adapun judul skripsi ini yaitu **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAYARAN JASA TAKSI DENGAN SISTEM ARGO (Studi Kasus pada Taksi Trans Lampung, Bandar Lampung)”**. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu antara lain:

Tinjauan adalah hasil meninjau pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, menyelidiki, dan sebagainya).²

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan yakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.³

Pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan

²Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, (Edisi 11, Balai Pustaka, 1991),h. 1060.

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta, kencana, 2009). h. 6.

dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.⁴

Jasa adalah aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah elemen (nilai atau manfaat) *intangible* yang berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.⁵

Taksi adalah sebuah transportasi non-pribadi yang umumnya adalah sedan serta dapat merujuk kepada angkutan umum lain selain mobil yang mengangkut penumpang dalam kapasitas kecil dengan menggunakan argo.⁶

Argo adalah alat untuk penetapan tarif pada taksi yang ditetapkan berdasarkan jarak dan waktu perjalanan.⁷

Jadi, yang penulis maksud dengan tinjauan hukum Islam tentang pembayaran jasa taksi dengan sistem argo pada taksi Trans Lampung adalah bagaimana cara pembayaran dengan sistem argo pada taksi Trans Lampung serta penetapan tarif argo dan bagaimana tinjauan menurut hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan penulisan dalam memilih skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Jasa Taksi Dengan Sistem

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Pembayaran” (*Online*) tersedia di <http://kbbi.web.id/pembayaran>, (diakses pada 11 april 2016)

⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Adi Mahasatya, 2007), Cet Ke-5, h. 194

⁶ Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.1419

⁷ *ibid*, h.1421

Argo (Studi Kasus Pada Taksi Trans Lampung, Bandar Lampung)”, adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Karena pertumbuhan masyarakat yang semakin padat, kebutuhan akan transportasi pun meningkat masyarakat membutuhkan sarana transportasi yang memadai namun, keadaan transportasi sekarang banyak yang tidak memadai, karena kurangnya sarana fasilitas yang diberikan, sehingga penumpang sering berdesak-desakan. Terkadang sarana yang diberikan tidak sesuai dengan tarif tersebut contohnya: dibus kita sudah membayar tarif tersebut tetapi tidak mendapatkan fasilitas yang tidak nyaman karena kurangnya tempat duduk penumpang sehingga penumpang berdiri sampai dengan tempat tujuannya.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, PT Lampung Jasa Utama (LJU) untuk memudahkan masyarakat untuk bertransportasi dengan mudah dan memberikan fasilitas seperti kenyamanan, keamanan, tepat waktu, dan lain-lain, tetapi taksi tersebut menetapkan diatas harga standar angkutan umum lainnya yaitu dengan menggunakan sistem argo. Sehingga penulis ingin meneliti lebih dalam tentang bagaimana tinjauan dilihat dari segi hukum Islam tentang pembayaran jasa taksi dengan sistem argo.

2. Alasan Subjektif

Ditinjau dari judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang diambil serta dipelajari penulis di bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. Selain itu lokasi penelitian yang ingin diteliti masih masuk dalam kawasan Bandar Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Pada era modern sekarang ini, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dan salah satu negara dengan jumlah populasi penduduk terbanyak di dunia. Oleh karena itu Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mewujudkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur di segala bidang baik nasional maupun daerah, salah satunya diperlukan sarana transportasi.

Transportasi merupakan sarana yang sangat dibutuhkan oleh lapisan masyarakat. Transportasi dapat diartikan sebagai sarana pengangkut untuk orang maupun untuk barang dengan menggunakan kendaraan tertentu untuk mencapai sesuatu tempat tujuan. Pengangkutan dikatakan sangat penting karena akan menunjang pembangunan diberbagai sektor, misalnya sektor perhubungan, sektor pariwisata, sektor perdagangan, sektor pendidikan, sektor teknologi, dan demikian juga sektor-sektor lain.⁸

⁸ Elfrida Gultom, *Hukum Pengangkutan Darat*, (Jakarta: Literata Lintas Media 2009), h.1.

Sesuai dengan tujuan dan penyelenggaraan transportasi yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang menentukan:

“Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, teratur, nyaman, dan efisien mampu memadukan modal transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan pertumbuhan dan sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.”

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa transportasi akan memperlancar dan menunjang pembangunan nasional di segala bidang. Aktifitas masyarakat yang juga berarti akan meningkatkan produktivitas dan mempercepat peningkatan taraf hidup masyarakat. Di Indonesia ada beberapa alternatif transportasi atau pengangkutan yang dapat digunakan yakni melalui pengangkutan darat, laut, dan udara dengan demikian dapat menjangkau seluruh pelosok kota yang ada di Indonesia.

Pada umumnya sebagian besar masyarakat sangat tergantung dengan angkutan umum bagi pemenuhan kebutuhan mobilitasnya, karena sebagian besar masyarakat tingkat ekonominya masih tergolong lemah atau sebagian besar tidak memiliki kendaraan pribadi. Banyaknya kelompok yang masih tergantung dengan angkutan umum ini tidak diimbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai, terutama ditinjau dari

kapasitas angkut. Akibatnya hampir semua angkutan umum yang tersedia terisi penuh sesak dengan penumpang. Hal ini menyebabkan para penumpang berusaha memilih alternative angkutan umum lainnya yang dirasa lebih nyaman, efektif dan efisien meskipun dengan biaya yang cukup besar.⁹

Pada masa sekarang ini perkembangan di bidang pengangkutan mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan semakin bertambahnya fasilitas pengangkutan, khususnya pada sektor angkutan darat yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat.

Salah satu alat pengangkutan darat yang banyak digunakan masyarakat adalah angkutan taksi. Angkutan taksi mempunyai kekhasan tersendiri yaitu melayani siapa saja yang memanggil dengan kualitas pelayanan standar pelayanan yang disediakan kendaraan umum lainnya dan memang dikhususkan untuk melayani penumpang sesuai dengan panggilan. Perbedaan utama antara taksi dan angkutan umum darat lainnya seperti bus terletak pada jumlah penumpangnya, taksi hanya memuat sekitar 4 orang penumpang dan penumpang tersebut biasanya berada dalam satu kelompok.

Taksi merupakan alat angkut umum yang menggunakan mobil untuk mengangkut penumpangnya. Umumnya taksi menggunakan mobil jenis sedan, tarif taksi dihitung melalui dua cara, menggunakan argometer yaitu dihitung secara otomatis tergantung jumlah jarak yang ditempuh, dan cara

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Aditya 2009), h. 8.

lain yaitu berdasarkan kesepakatan penumpang dan pengemudi taksi. Karakteristik istimewa yang dimiliki taksi membuat tarif taksi ditetapkan di atas tarif angkutan umum lainnya.

Secara operasional kegiatan penyelenggaraan pengangkutan dilakukan oleh pengemudi atau supir, pengemudi merupakan pihak yang mengingatkan diri untuk menjalankan kegiatan pengangkutan atas perintah pengusaha angkutan atau pengangkut. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan pasal 234 ayat 1 yang menyatakan bahwa pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi. Pertanggung jawab pengangkut ini juga diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 2009 tentang pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Demikian pula yang diatur dalam al-Qur'an, surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا

يُرِيدُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan

kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. ”¹⁰

Ibnu Abbas dan Mujahid serta lain-lain yang bukan hanya seorang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *uqud* ialah perjanjian-perjanjian. Ali Ibnu Abu Abbas meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yaitu janji-janji itu menyangkut hal-hal yang dihalalkan oleh Allah dan hal-hal yang diharamkan-Nya serta hal-hal yang difardukan oleh-Nya dan batasan-batasan (hukum-hukum) yang terkandung di dalam al-Quran seluruhnya, dengan kata lain, janganlah kalian berbuat khianat dan janganlah kalian langgar hal tersebut.¹¹

Dengan demikian juga upah dalam bekerja perlu di beri aqad-aqad sebagaimana yang dimaksud dengan upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati. Sebagaimana dasar upah mengupah memberikan upah kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan hukumnya boleh,¹² berdasarkan firman Allah surat (At-Tholaq : 6

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Fajar Mulya*, Surabaya, 2002, h. 106.

¹¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Al-Maida*, <http://www.ibnukatsironline.com/>

¹² kumedi ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Lampung, Permatanet Publishing, 2016), h. 141

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ط وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ^ط وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمِثْرُكُمْ^ط فَسْتَرْضِعْ لَهُ^ط أُخْرَى

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.¹³

Berdasarkan data pra survei yang dilakukan peneliti pada salah satu kepala keuangan kantor taksi Trans Lampung pada hari Selasa 26 September 2017 di kantor PT. Lampung Jasa Utama di Jalan Jend Sudirman No. 81 Pahoman Bandar Lampung. Didapati bahwa taksi Trans Lampung menggunakan tarif penetapan argo, yang mana tarif tersebut sudah tertera sekali membuka pintu penumpang dikenakan tarif Rp. 7.000,- dan tarif minimal Rp. 25.000,- yang mana pada tarif ini jarak pemeternya Rp. 450 per 100 meter. Jika jarak yang ditempuh oleh penumpang dekat atau pun jauh maka dikenakan tarif minimal tersebut yaitu Rp. 25.000,- dan jarak per meter tidak terlaksana apabila jarak perjalanan nya dekat. Di mana supir terlebih dahulu memberi suatu

¹³ Op.Cit., Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h.559

perjanjian kepada penumpang tentang tarif pembayaran tersebut. Penetapan tarif resmi taksi sesuai Peraturan Pemerintah nomor PM. 26 Tahun 2017 tentang tarif atas dan tarif bawah. Tetapi perjanjian ini tidak dilakukan oleh supir sehingga penumpang pengguna taksi Trans Lampung tidak mengetahui sistem tarif penetapan harga taksi tersebut.

Pada pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan definisi perjanjian yang berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Dalam pasal 1320 KUHPerdata disebutkan syarat sah nya perjanjian yaitu:

- 1) Adanya kesepakatan antara para pihak.
- 2) Adanya kecakapan untuk membuat sebuah perjanjian.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang sah.

Perjanjian pengangkutan ialah suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa penumpang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.¹⁴

Keputusan Menteri perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang pasal 1 mendefinisikan: Angkutan taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.

¹⁴R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: Intermas, 1985), h.222

Berdasarkan latar belakang masalah di atas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang pembayaran jasa taksi dengan sistem argo yang dilakukan oleh Taksi Trans Lampung di Bandar Lampung dengan menekankan perjanjian suatu pembayaran tarif taksi apakah sesuai dengan tinjauan hukum Islam. Kemudian penulis menuangkan dalam sebuah judul penelitian yaitu **Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Jasa Taksi Dengan Sistem Argo (Studi Kasus Pada Taksi Trans Lampung, Bandar Lampung)** diharapkan dari hasil kajian ini dapat dijadikan acuan dalam ilmu hukum ekonomi Islam yang baik (sah) dan sesuai dengan ajaran Islam agar tidak ada unsur maysir, riba, ghoror di dalamnya dan menghindarinya dalam setiap transaksi ekonomi dan bisnis.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas yang selanjutnya akan menjadi objek dari permasalahan. Adapun yang jadi pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana sistem penetapan argo pada taksi Trans Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pembayaran jasa taksi dengan sistem argo pada taksi Trans Lampung?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sistem penetapan argo pada taksi Trans Lampung
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan argo yang dilakukan oleh taksi Trans Lampung

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat (pengguna transportasi taksi) penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai hukum transportasi dengan cara penetapan sistem argo pada taksi ditinjau dari segi hukum Islam. Dan diharapkan dapat memperkaya pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan tentang keislaman. Selain itu diharapkan menjadi stimulator bagi peneliti sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Secara praktis, penelitian ingin mendapatkan pengetahuan atau teori tentang bagaimana sistem penetapan tarif argo ditinjau dalam hukum Islam. Selain itu penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana S.H pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Indan Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah merupakan suatu kegiatan/cara ilmiah yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu *rasional, empiris, dan sistematis* untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu¹⁵. Dalam ini penulisan mendapatkan data penelitian di lapangan langsung tentang pembayaran jasa taksi dengan sistem argo, dengan objek penelitian yang langsung dilakukan oleh usaha PT. Lampung Jasa Utama Taksi Trans Lampung.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹⁶ Adapun lokasi penelitian ini adalah taksi Trans Lampung Kota Bandar Lampung yaitu sebagai sumber data primer, sedangkan sumber data sekunder yaitu buku-buku fiqih dan buku-buku lain yang secara langsung maupun tidak langsung ada hubungannya dengan pokok permasalahan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sedetail/secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu¹⁷. Di dalam penelitian

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung Alfabeta, 2011), Cet Ke-13, h. 1.

¹⁶ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grafindo, 2008), h. 2-3.

¹⁷ . Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54.

ini penulis akan menjelaskan mengenai tinjauan hukum Islam tentang pembayaran jasa taksi dengan sistem argo.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung.¹⁸

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer langsung dari lapangan, yakni berupa yang metode pengumpulan data secara observasi, wawancara, interview, dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data menggunakan riser, yang dilakukan dengan cara membaca buku, jurnal, artikel, majalah, makalah dan sumber-sumber lain berkaitan dengan judul skripsi.¹⁹

penelitian adalah para karyawan staf dan beberapa supir taksi trans lampung, adapun jumlah populasi yang diteliti sebanyak 110 orang.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan, fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh dari observasi yang merupakan

¹⁸Sugiyono, Op.Cit, h. 14.

¹⁹ *ibid.*, h. 58

salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian kualitatif.²⁰ Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung ke kantor PT. Lampung Jasa Utama (LJU) Taksi Trans Lampung yang melakukan pembayaran jasa taksi dengan sistem argo, dengan cara observasi ini peneliti dapat memperoleh data yang utuh, baik dan akurat. Metode ini dilakukan untuk mengetahui gambaran umum objek yang dalam penelitian.

b. Interview/Wawancara

Interview atau sering disebut wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data, dilakukan melalui wawancara untuk mendapatkan informasi secara langsung.²¹ Penulis menyiapkan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada pegawai staf, supir dan juga kepala keuangan Kantor Taksi Trans Lampung tersebut untuk mengetahui penetapan sistem argo yang ditinjau dalam hukum Islam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa buku, catatan foto, transkrip, surat kabar, majalah, agenda, dan lain sebagainya.²² Metode ini digunakan untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung, CV.Pustaka Setia, 2008), Cet Ke 1, h. 189

²¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 39

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 236

pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian mengenai tinjauan hukum Islam tentang pembayaran jasa taksi dengan sistem argo.

5. Metode Pengolahan Data

Apabila data telah terkumpul maka akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing adalah memeriksa data yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan di dalam pertanyaan kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi kelengkapan jawaban, tulisan, keseragaman satuan data, sudah benar atau relevan dengan data penelitian di lapangan ataupun dari literatur.
- b. Coding adalah mengklasifikasikan jawaban dari para responden, biasanya dilakukan dengan cara pemberian, tanda/kode dalam berbentuk angka pada masing-masing jawaban.²³
- c. Sistematis adalah melakukan pengecekan data/bahan yang diperoleh secara terarah, beraturan dan sistematis sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.²⁴

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan sesuai dengan kajian dalam penelitian yaitu tinjauan hukum Islam tentang pembayaran jasa taksi dengan sistem argo. Kemudian kajian dengan menggunakan analisis secara kualitatif yang berupa suatu prosedur yang menghasilkan data

²³ Cholid Narbuko, H. Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 153-154

²⁴ Noer Saleh, Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi*, (Jakarta: Gunung agung, 1989),h. 16

deskriptif, yang merupakan gambar penjelasan secara logis dan sistematis. Metode berpikir yang digunakan penulis secara deduktif, dari metode tersebut ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat di dalam penelitian.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Jasa Taksi Menurut Tinjauan Hukum Islam

Jasa taksi adalah boleh menurut hukum Islam. Penyediaan jasa taksi perlu izin kepada Negara yang melakukan usaha jasa taksinya sebagaimana jual-beli dan media masa. Tiap pekerjaan yang halal, maka hukum mengontraknya adalah halal pula. Sehingga transaksi tersebut boleh dilakukan. Syarat sah dan tidaknya transaksi tersebut adalah bahwa jasa dalam kontrak adalah jasa yang mubah. Tidak diperbolehkan mengadakan kontrak untuk melakukan jasa yang diharamkan. Sehingga, tidak diperbolehkan mengadakan kontrak jasa untuk mengangkat minuman keras, mengangkat narkoba, dan lainnya. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Anas Bin-Malik yang artinya: “Rasulullah Saw. Melaknat masalah khamer sepuluh orang yaitu: pemerasnya, orang yang diperaskan, peminumnya, pembawaannya, orang yang dibawakan, orang yang mengalirkannya, penjualannya, pemakan keuntungannya, pembelinya, termasuk orang yang dibeli.”

Allah SWT berfirman (QS. Al-Maidah: 2) :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”²⁵

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Fajar Mulya, Surabaya, 2002, h.106.

Dalam menjamin penerapan hukum-hukum Syariah untuk mencegah kedzaliman maka Negara Khilafah dengan *Qadhi Hisbah*-nya akan memastikan:

1. Mobil taksi dikemudikan oleh supir yang berkemampuan. Negara akan mewajibkan bahwa seorang supir mobil telah menjalani pelatihan dan telah lulus ujian kemampuan mengendarai mobil sehingga mendapatkan surat izin mengemudi.
2. Mobil taksi telah lulus uji kelayakan kendaraan. Mobil yang tidak layak diduga kuat sdapat menimbulkan bahaya. Rasulullah Saw, bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : “Tidak boleh ada dharar (bahaya) dan tidak boleh ada yang membahayakan”.²⁶

3. Taksi meter atau argo yaitu alat yang dipasang pada taksi yang menghitung ongkos jasa taksi berdasarkan jarak yang ditempuh maupun kombinasi jarak dan waktu tumbuh yang digunakan taksi mandapatkan pemeriksaan mengenai keakuratannya sehingga tidak terjadi kedzaliman. Rasulullah Saw, bersabda:

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya : “Siapa yang menipu maka ia bukan bagian dari golongan kami.”²⁷

²⁶ Ibnu Hajar Alasqolani, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, (Jakarta: Daruun Nasyr al Misyriyyah th), h. 189.

²⁷ *Ibid*, h. 187

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسِهِ

Artinya : “Tidak halal harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaannya.”²⁸

4. Tarif jasa taksi harus jelas di awal bagi penyedia jasa maupun konsumen sehingga transaksinya diridhoi kedua pihak, tidak fasil/rusak. Diriwayatkan dari Abi Sa'id:

نَهَى عَنْ إِسْتِجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ

Artinya : “Bahwa Nabi SAW, melarang mengontrak seorang ajiir hingga upahnya jelas bagi ajiir tersebut.”²⁹

1. Pengertian Pembayaran Jasa Taksi

Sistem pembayaran yaitu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga berikut aturan mainnya.

Pembayaran dalam hal ini tidak hanya meliputi penyerahan sejumlah uang, tetapi juga penyerahan suatu benda. Dengan kata lain,

²⁸ Ibid, h. 172.

²⁹ Ibid, h. 168.

perikatan berakhir karena pembayaran dan penyerahan benda. Jadi, dalam hal objek perikatan adalah sejumlah uang, maka perikatan berakhir dengan pembayaran uang. Dalam hal objek perikatan adalah suatu benda, maka perikatan berakhir setelah penyerahan benda. Dalam hal objek perikatan adalah pembayaran uang dan penyerahan benda secara timbal balik, perikatan baru berakhir setelah pembayaran uang dan penyerahan benda.³⁰

Manusia diciptakan oleh Allah swt sebagai makhluk yang tidak biasa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain, salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkungan muamalah ialah upah-mengupah, yang dalam Fiqh Islam disebut *ijarah*.

Lafal *al-ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.³¹

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru*, yang arti menurut bahasa ialah al-iwadh, arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. Menurut MA. Timahi, *al-ijarah* (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung; PT Citra Aditya Bakri, 2014), h. 282.

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Gaya Media Pratama, 2007), h. 228.

sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran sewa tertentu.³²

Ijarah adalah “pemilik jasa dari seseorang yang menyewakan (*mu'ajir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *Musta'jir* oleh seorang *Mu'ajir*”.³³ Dengan demikian, *ijarah* berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensansi tertentu pula.

Adanya kaidah-kaidah dalam hukum kontrak (kesepakatan) dapat dibagi menjadi dua macam yaitu tertulis dan tidak tertulis. Pada hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum yang tidak tertulis adalah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat.³⁴

Sedangkan secara *etimologis* kesepakatan kerja dalam Islam disebut dengan *al-ijarah* yang berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya adalah ganti dan upah.

Definisi hukum kesepakatan atau kontrak merupakan sumber perikatan dan persetujuan salah satu syarat sahnya kesepakatan.

³²Sohari sahrani dan Ru'Fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 167

³³ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 81.

³⁴ Salim H. S., *Hukum Kontrak (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafindo 2003), h. 4.

Kesepakatan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat atau menimbulkan akibat hukum.³⁵

Penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah salah satu transaksi dalam bermu'amalah dalam Islam, yang berisi penukaran jasa dan dapat diambil pemanfaatannya.

Upah menurut Benham, Sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.³⁶ Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi. Jika pekerja tidak menerima upah akan mempengaruhi standar kehidupan bagi para pekerja.

Definisi upah menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan tercantum pada Pasal 1 Ayat 30 yang berbunyi: "Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atas pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-

³⁵ Salim H.S, Lok. Cit.

³⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Penerbit Dana Bakti Wakaf), h. 5.

undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarga atas suatu pekerja atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Seorang lelaki dan perempuan dapat disatukan dalam menjalani kehidupan dengan akad. Dengan adanya akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang lain. Dapat dibenarkan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ada dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dengan makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tidak lepas dari akad (perjanjian), bentuk kepentingan kita. Oleh karena itu dapat kita pahami bahwa betapa pentingnya akad (perjanjian).

Akad yang sesuai dengan syari'ah adalah yang tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian atau penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga uang), *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Dapat disimpulkan bahwa taksi Trans Lampung dilaksanakan oleh seseorang atau lebih untuk memperkuat ikatan solidaritas dan tanggung jawab sosial bagi kaum muslim melalui tolong-menolong untuk mencapai keharmonisan dan stabilitas dalam kehidupan sosial masyarakat. Mekanisme itu dibenarkan,

bahkan dianjurkan oleh ahli hukum Islam berdasarkan teori *mashlahat*, karena *mursalah-nya* yang besar bagi kesejahteraan umat manusia.

Definisi *ijarah* menurut ulama Malikiyah dan Hanabaliah hampir sama dengan pendapat ulama yang intinya adalah suatu transaksi akad yang dapat memberi manfaat dengan waktu yang telah ditentukan dan memberikan imbalan.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *ijarah* merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seseorang *mu'ajir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan disengaja dengan cara memberikan penggantian (kompensasi/Upah).

Pembayaran upah (*ijarah*) suatu pekerjaan, saat berakhirnya suatu pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanafi wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.³⁷ Ketika pekerjaan

³⁷ Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), h. 121.

selesai dikerjakan, beralasan pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “dari Abdillah bin Umar ia berkata : Berkata Rosulullah SAW : Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering” (H.R Ibnu Majah)³⁸

Pengertian pembayaran menurut UU No.23 tentang pasal 1 menyatakan bahwa: “Pembayaran mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.”

Pengertian pembayaran menurut Hasibuan yaitu: “Berpindahnya hak kepemilikan atas sejumlah uang atau dan dari pembayaran kepada penerimanya, baik langsung maupun melalui media jasa-jasa perbankan.

Definisi di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pembayaran adalah mekanisme yang dilakukan untuk pemindahan mata uang menjadi barang, jasa atau informasi dari pembayaran kepada penerima, baik langsung maupun melalui media jasa-jasa perbankan..

³⁸ Ibid, h. 188

Pengertian di atas jelas bahwa pembayaran merupakan suatu cara untuk memenuhi suatu kewajiban tertentu dengan mengeluarkan uang baik secara tunai atau melalui penyerahan harta dalam bentuk jasa.

Pembayaran tarif taksi pada umumnya berupa pembayaran yang modern di mana taksi mempunyai tarif tersendiri dalam pembayaran pada angkutan umum lainnya, taksi mempunyai tarif pembayaran yang menggunakan tarif dasar taksi, jarak tempuh dan jalan mana yang akan kita lintasi. Pembayaran jasa taksi menggunakan argo yang mana dihitung jarak pembayaran yang kita tempuh. Kita perlu mengetahui tarif dasar taksi, tarif bawah, dan tarif awal taksi tersebut, pembayaran jasa taksi ini pun menggunakan pembayaran dengan tarif tunggu, apabila penumpang ingin *drop-off* atau memberhentikan perjalanannya untuk beberapa waktu dan dilanjutkan lagi, maka argo tetap berjalan dan dihitung perdetik dari tarif harga yang sudah ditentukan oleh pihak perusahaan taksi tersebut. Semakin tinggi persaingan jasa taksi di kalangan masyarakat pada ruang lingkup pemasarannya tidak mencangkup pada hasil produk yang *tangible* saja, tetapi juga mencangkup pada produk yang *intangible*.

Tarif pembayaran taksi ditetapkan pengaturannya oleh Menteri. Tarif taksi ini terdiri dari:

a. Tarif awal

Angka awal yang tertera pada argometer taksi setelah argometer taksi dihidupkan pada permulaan penyewaan, yang menunjukkan

biaya permulaan/dasar sebagai biaya minimum yang tidak berubah untuk jangka waktu atau jarak tempuh tertentu.³⁹

b. Tarif dasar

Tarif dasar adalah besarnya tambahan tarif yang dikenakan atas dasar jarak selanjutnya yang ditempuh.⁴⁰

c. Tarif jarak dan tarif waktu yang ditunjukkan dalam argometer

Tarif jarak adalah besarnya tarif yang tertera dalam argometer yang harus dibayar oleh penumpang, yang didasarkan atas tarif awal. Sementara tarif waktu adalah besarnya tambahan tarif yang dikenakan atas dasar penggunaan waktu misalnya dalam hal taksi menunggu atau dalam kondisi lalu lintas macet.⁴¹

Seperti pada umumnya jasa angkutan transportasi lainnya, taksi juga masih menggunakan sistem setoran dalam mengatur pemasukan sebuah bisnis transportasi taksi. Sistem setoran pada taksi adalah suatu sistem yang mewajibkan pengemudi angkutan umum untuk membayar sejumlah uang yang ditetapkan sebelumnya setiap hari atas pekerjaan dalam menjalankan armada transportasi tersebut kepada manajemen operator penyelenggara jasa transportasi tempat ia bekerja.⁴²

Tarif taksi yang berlaku ditentukan berdasarkan perjanjian di awal di mana apabila konsumen yang memesan taksi lewat via telepon maka kesepakatan perjanjian pembayaran dilakukan di telepon, pihak

³⁹ibid., Penjelasan Pasal 49 ayat 1 butir 1.

⁴⁰ ibid., Penjelasan Pasal 49 ayat 1 butir 2.

⁴¹PP No. 41/1993, op.cit., ps 49 ayat 2.

⁴²Usman Adji; Djoko Prakoso; dan Hari Pramono, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Cet 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.112.

karyawan taksi menjelaskan tarif taksi dari harga yang sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan taksi.

Definisi pengangkutan di atas maka terdapat rangkaian pemindahan itu meliputi :

- a. Memuat penumpang dan atau barang kedalam alat pengangkut.
- b. Membawa penumpang dan atau barang ketempat tujuan menurunkan penumpang atau membongkar barang ditempat tujuan.
- c. Menurunkan penumpang atau membongkar barang ditempat tujuan.⁴³

Pengertian lain dari pengangkutan adalah kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain baik melalui angkutan darat, angkutan perairan, maupun angkutan udara.

Perjanjian pengangkutan menimbulkan akibat hukum bagi pelaku usaha dan penumpang sebagai hal yang dikehendaki oleh kedua belah pihak hal ini diatur berdasarkan pasal 1338 KUHPerd yang menyebutkan:

- a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- b. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- c. Suatu perjanjian harus dilaksanakan itikad baik.

⁴³ Op.Cit., Abdul Qaodir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Cet. III

2. Dasar Hukum Pembayaran Jasa Taksi

Memahami dasar hukum pembayaran jasa taksi, salah satu perkara tenaga kerja yang selalu menarik perhatian untuk dibahas adalah upah. Pemerintah telah membuat regulasi mengenai besarnya upah yang wajib dibayarkan oleh setiap perusahaan kepada pekerjaannya komponen upah sendiri terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap dengan besarnya upah pokok adalah minimal 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap itu sendiri. Pada beberapa perusahaan pengangkutan, seperti perusahaan taksi ada perjanjian kemitraan yang menguntungkan kedua pihak. Tarif penumpang dengan menggunakan taksi ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum atas persetujuan pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan standar minimal yang ditetapkan. Jadi tarifnya boleh ditetapkan oleh perusahaan, tapi atas persetujuan pemerintah.

Upah mengupah atau *ijarah 'ala al-a'mal*, yakni jual-beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah 'ala al-a'mal*.⁴⁴ terbagi dua yaitu:

a. *Ijarah Khusus*

Yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

b. *Ijarah Musytarik*

Yaitu *ijarah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.

⁴⁴ H. Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung; Puataka Setia, 2001), h.133-134

Di dalam dasar hukum pembayaran jasa taksi, pembayaran jasa taksi dilakukan sesuai penetapan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia yaitu pengangkutan taksi secara regular dan secara eksekutif.

- a. Pelayanan angkutan taksi regular sebagaimana merupakan taksi yang menggunakan kendaraan dengan batasan paling sedikit 1.000 *centimeter* sampai dengan 1.500 *centimeter* dilengkapi fasilitas standar pada kendaraan.
- b. Pelayanan angkutan taksi eksekutif sebagaimana merupakan taksi yang menggunakan kendaraan di atas 1.500 *centimeter* dilengkapi dengan fasilitas standar fasilitas tambahan pada kendaraan.⁴⁵

Pelayanan angkutan taksi wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:

- a. Wilayah operasi pelayanan berada di kawasan perkotaan
- b. Tidak berjadwal
- c. Pelayanan dari pintu ke pintu
- d. Tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa
- e. Tarif angkutan berdasarkan argometer atau tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi
- f. Besaran tarif berdasarkan tarif batas atas dan batas bawah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan
- g. Wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan
- h. Pembayaran pada pelayanan angkutan taksi yang dilakukan berdasarkan argometer dilengkapi dengan pembayaran alat bukti pembayaran yang tercetak.

⁴⁵ *Ibid.h.* 140

Para ulama fiqh mengatakan yang menjadi dasar kebolehan akad *ijarah* adalah al-Quran, sunnah dan ijma.⁴⁶

a. Landasan Al-Quran

Q.S Al-Qasas ayat : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَجِرُّهُ إِنِّي خَيْرٌ مِّنْ اسْتَجِرَّتِ
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".⁴⁷

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa di dalam ayat di atas disyaratkan adanya imbalan atau upah mengupah atau mempekerjakan orang lain yang punya keahlian di bidangnya.

b. Landasan sunnah

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ (رواه ابن ماجه)

⁴⁶ *ibid*, h. 116.

⁴⁷ *Op.Cit.*, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.388.

Artinya : *“Dari Abdillah bin Umar ia berkata : Berkata Rosulullah saw : Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”* (H.R Ibnu Majah)⁴⁸

Hadis di atas menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu nabi sangat mengajurkan agar dalam pembayaran upah itu hendaknya sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan.

c. Landasan Ijma

Mengenai kebolehan ijarah para ulama sepakat tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma) ini sekalipun ada di antara mereka yang berbeda pendapat akan hal itu tidak dianggap. Jelaslah Allah swt telah mensyariatkan ijarah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan ummat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijarah*.

3. Rukun Dan Syarat Pembayaran Dalam Islam

a. Pengertian Rukun⁴⁹

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau transaksi. Tanpa rukun akad tidak akan sah. Rukun-rukun dan syarat-syarat pembayaran dalam Islam adalah sebagai berikut:

- 1) *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang

⁴⁸ Ibnu Hajar Alasqolani, *Bulughul Marom Min Adilati Ahkam*, (Jakarta: Daruun Nasyr al Misyriyyah,t.th), h. 189

⁴⁹

menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewakan sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Allah Swt berfirman dalam Q.S An-Nissa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵⁰

- 2) *Shighat ijab Kabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab Kabul upah-mengupah misalnya seorang berkata: kuserahkan mobil ini kepadamu untuk dijadikan bisnis angkutan dengan upah setiap hari Rp. 40.000, kemudian *musta'jir* menjawab “aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.
- 3) Upah (*Ujrah*) disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

⁵⁰ Op. Cit., Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.83.

4) Manfaat, manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah.⁵¹

5) Barang yang disewakan atau sesuai yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:

a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

b) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-meyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya.

c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara bukan hal yang dilarang (diharamkan).

d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal ain (zat) nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.⁵²

Penentuan upah dan pembayaran, masalah yang paling penting dalam *ijarah* adalah menyangkut pemenuhan hak-hak *musta'jir*, terutama sekali hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hak-hak atas jaminan sosial dan hak atas upah yang layak. Untuk itu perlu dikaji tentang ketentuan hak-hak *musta'jir* terutama tentang upah. Pembayaran upah adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang menyewa/mengupa seseorang untuk melakukan pekerjaan. Upah adalah hak yang harus diterima oleh orang yang

⁵¹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 232

⁵² *Ibid*, h. 236

dipekerjakan setelah pekerjaan itu selesai dilakukan. Dalam ketentuan Islam dikatakan apabila seseorang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan maka hendaklah pembayaran upah itu mereka tentukan terlebih dahulu. Sedangkan pembayaran upahnya yang tidak ada aturan yang mengaturnya perlu ada perjanjian dan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk itu dalam perjanjian *ijarah* memberikan jasa pembayaran harus menetapkan kapan dan berapa jumlah upah yang akan diterima, agar terjadi kesepakatan dan kerelaan diantara kedua belah pihak, sehingga pekerjaan akan dilakukan dengan ikhlas dan senang hati serta dapat mencegah perselisihan.⁵³

Pembayaran ini dapat dipercepat dan dapat pula ditangguhkan. Menurut mazhab Hanafi masyarakat mempercepat upah dan menangguhkan upah boleh dengan syarat adanya kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak.⁵⁴

Jika dalam akad tidak ada kesepakatan untuk mempercepat dan menangguhkan pembayaran upah, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Metode pembayaran adalah cara yang dilakukan pelanggan untuk membayar barang dan jasa.

b. Pengertian Syarat

Dalam salah satu syarat *ijarah* adalah adanya upah dan dalam upah adanya prinsip keadilan, kelayakan dan prinsip kebijakan.

⁵³ *Ibid*, h. 241.

⁵⁴ *Ibid*, h. 243.

Syarat *ijarah* terdiri empat macam, sebagaimana syarat dalam jual-beli, yaitu syarat *al-inqad*(terjadi akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim:

1) Syarat Terjadinya Akad

Syarat *in'inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan aqid, zat akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual-beli menurut ulama Hanafiyah, 'aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijarah* anak *mumayyiz*, dipandang sah bila telah diizinkan walinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *ijarah* dan jual-beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* adalah sah, tetapi bergantung atas keridaan walinya.

2) Syarat pelaksanaan (*an-nafadz*)

Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk *akad* (ahlih). Dengan demikian, *ijarah al-fadhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.

3) Syarat Sah *Ijarah*

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang akad), *mu'qad 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-aqad*), yaitu:

a) Adanya keridaan dari kedua pihak yang akad

Syarat ini didasarkan pada firman Allah swt dalam QS. An-

Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵⁵

Ijarah dapat dikategorikan jual-beli sebab mengandung unsur pertukaran harta. Syarat ini berkaitan dengan *aqid*.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.

⁵⁵ Op.Cit.,Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* , h.83.

4. Macam-Macam Akad Pembayaran

Akad pembayaran yang dilakukan menurut hukum Islam terdapat dalam macam-macam *ijarah*. *Ijarah* diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

a. Upah yang sepadan (*ujrah al-misli*)

Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan pekerjaannya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat transaksi pembelian jasa.

maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaan atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut.

b. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*)

Upah yang disebutkan ujrah al-musamma syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara.

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila belum disebutkan ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan maka upahnya bisa diperlakukan upah yang sepadaan (*ajrul misli*).⁵⁶

Akad menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan, sedangkan menurut istilah akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang (yang menyerahkan) dengan orang lain (yang menerima) untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Rukun akad dan syarat akad.⁵⁷ adapun rukun akad adalah:

- a. Dua orang atau lebih yang melakukan akad (transaksi) disebut aqidain.
- b. Sighat (ijab dan qabul)
- d. Maqud' alaih (sesuatu yang diakadkan)⁵⁸

Sementara itu syarat akad adalah sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang bertransaksi yaitu berakal, baligh, dan orang-orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad.
- b. Syarat barang yang diakadkan yaitu bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad dan barang itu diketahui keberadaannya.

⁵⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung; CV Pustaka Setia, 2001), h. 133.

⁵⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 2007), h. 72.

⁵⁸ *Ibid*, h. 245

- c. Syarat sighat yaitu dilakukan dalam satu majlis, ijab dan qabul harus ucapan yang bersambung, ijab dan kabul merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab.

Ada beberapa macam akad, antara lain:

- a. Akad lisan, yaitu akad yang dilakukan dengan cara pengucapan lisan.
- b. Akad tulis, yaitu akad yang dilakukan secara tertulis, seperti perjanjian pada kertas bersegel atau akad yang melalui akta notaris.
- c. Akad perantara utusan (wakil), yaitu akad yang dilakukan dengan melalui utusan atau wakil kepada orang lain agar bertindak atas nama pemberi.
- d. Akad isyarat, yaitu akad yang dilakukan dengan isyarat atau kode tertentu.
- e. Akad ta'at (saling memberikan), akad yang sudah berjalan secara umum.

Pengertian akad secara umm, pengertian akad dalam arti luas hamper sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu:

*Artinya: Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, gadai, perwakilan.*⁵⁹

⁵⁹ Ibnu Taimiyyah, *Nazhariyah al-Aqdi*, h. 18-21.

Definisi akad istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut akad dalam hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian):

- 1) Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan, pertemuan ijab yang diajarkan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.⁶⁰
- 2) Menurut penulis akad adalah, “pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.”⁶¹

Kedua definisi di atas memperlihatkan bahwa, pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan Kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan Kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu

⁶⁰Basya, *Mursyid al-Hairan*, (Kairo: Dar al-Furjani, 1403/1983), h. 49.

⁶¹*Ibid*, h. 136.

pihak dan Kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji member hadiah, wasiat, wakaf atau pelepasan hak, bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karena nya tidak memerlukan kabul. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum, lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut hukum akad. Tujuan akad untuk akad bernama sudah ditentukan secara umum oleh pembuatan hukum syariah, sementara tujuan akad untuk akad tidak bernama ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka menutup akad.⁶²

c. Sistem Pembayaran/Pengupahan

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanafiah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir*

⁶²Syamsul Anwar, Op. Cit, h. 69.

menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya.⁶³

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat:

- a. Pekerjaan telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan
- b. Mendapatkan manfaat, jika *ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut akan menjadi batal.
- c. Ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- d. Mempercepat pembayaran sewa atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dalam hal penangguhan pembayaran.⁶⁴

Secara umum, dalam ketentuan Al-Qur'an yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah dijumpai dalam firman Allah swt Surat al-Qashas ayat: 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَعْجِرُهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعْجَرَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ
تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ
أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

65

⁶³ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, H. 121

⁶⁴ *Ibid*, h. 200.

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu dan kamu *insya* Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".⁶⁶

5. Pengertian Ijarah

Lafal *al-ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.⁶⁷

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru*, yang arti menurut bahasa ialah al-iwadhi, arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. Menurut MA. Timahi, *al-ijarah* (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran sewa tertentu.⁶⁸

Ijarah adalah "pemilik jasa dari seseorang yang menyewakan (*mu'ajir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari

⁶⁵ *Op. Cit.*, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.277.

⁶⁶ *Op. Cit.*, Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, h. 28.

⁶⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Gaya Media Pratama, 2007), h. 228.

⁶⁸ Sohari sahrani dan Ru'Fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 167

pihak *Musta'jir* oleh seorang *Mu'ajir*".⁶⁹ Dengan demikian, *ijarah* berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.

Ijarah adalah salah satu transaksi dalam bermu'amalah dalam Islam, yang berisi penukaran jasa dan dapat diambil pemanfaatannya.

Definisi *ijarah* menurut ulama Malikiyah dan Hanabaliah hampir sama dengan pendapat ulama yang intinya adalah suatu transaksi akad yang dapat memberi manfaat dengan waktu yang telah ditentukan dan memberikan imbalan.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *ijarah* merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seseorang *mu'ajir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan disengaja dengan cara memberikan penggantian (kompensasi/Upah).

Pembayaran upah (*ijarah*) suatu pekerjaan, saat berakhirnya suatu pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya.

Masalah yang paling penting dalam *ijarah* adalah menyangkut pemenuhan hak-hak *musta'jir*, terutama sekali hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hak-hak atas jaminan sosial dan hak atas upah yang layak. Untuk itu perlu dikaji tentang ketentuan hak-hak *musta'jir* terutama tentang upah.

⁶⁹ Taquuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 81.

B. Pengertian Tentang Argo

Argo atau argometer adalah alat untuk penetapan tarif pada taksi yang ditetapkan berdasarkan jarak dan waktu perjalanan. Argometer ditera/kalibrasi secara regular dan disegel oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Perdagangan khususnya yang mengenai metrologi. Argometer yang pasti akan berubah-ubah dan baru berhenti atau dimatikan setelah sampai tujuan, jika kita perhatikan, pada saat taksi sedang berhenti karena macet atau sedang lampu merah argo taksi tetap jalan. Ternyata argo taksi ini menggunakan dua perhitungan berdasarkan jarak (argo jarak/km) dan waktu (argo waktu/menit).

1. Dasar Hukum Penetapan Argo

Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah Swt, telah mengatur hidup umat nya dengan dasar hukum yang jelas, yaitu al-Quran dan sunah Rasulullah saw Agama Islam merupakan pegangan manusia untuk mencapai tujuan hidup menurut Islam. Dimana manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup salah satunya sarana transportasi untuk membantu setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, Transportasi yang digunakan biasanya yaitu taksi dengan tarif pembayaran menggunakan argo, terutama untuk tujuan-tujuan dalam kota, atau dari dan ke bandara, pelabuhan serta terminal bus. Konsumen rela membayar mahal untuk taksi demi kenyamanan, keamanan, dan karena mempunyai *privasi* di banding angkutan umum. Permintaan

yang tinggi terhadap jasa pelayanan taksi berimbas pula pada meningkatnya keuntungan yang didapatkan oleh sebuah operator taksi hal ini menjadikan usaha taksi dianggap sebagai sebuah prospek bisnis.

Dasar hukum penetapan argo ini juga harus dilaksanakan dengan syariat Islam yang mana penetapan tarif argo harus sesuai dengan dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan telah disahkan oleh dinas perhubungan.

Diiringi dengan perkembangan teknologi yang semakin tinggi, sarana yang diberikan teknologi kepada masyarakat di dunia pun semakin canggih. Alat transportasi mulai berkembang dengan kedatangannya taksi online, kini taksi konvensional mulai menurun karena perbandingan tarif taksi online dan konvensional setelah aturan baru.

Meski tarif dasar taksi online dan konvensional kini hampir sama, masih ada perbedaan ongkos buka pintu, waktu tunggu dan jam sibuk. Kementerian Perhubungan telah mengefektifkan tarif baru taksi online per 1 Juli 2017. Batas bawah dan atas tarif taksi online disesuaikan mengacu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017. Dengan ketentuan tersebut, tarif taksi online kini hampir sama dengan yang konvensional.

Tarif taksi online kini didasarkan pada dua zona wilayah. Wilayah pertama terdiri Pulau Sumatra, Bali, dan Jawa dengan tarif bawahnya

sebesar Rp 3.500 per kilometer, sementara tarif batas atasnya Rp 6.000, sedangkan taksi konvensional yaitu taksi Trans Lampung menggunakan tarif resmi tentang tarif atas dan tarif bawah yaitu: Buka Pintu : Rp 7.000 Tarif/KM : Rp 4.500

Sementara Go Car dan Uber menetapkan tarif sesuai batas bawah yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 3.500 per kilometer, serta Grab Car Rp 4.000 per kilometer. Bedanya, pada jam sibuk, Go-Car menerapkan tarif yang lebih tinggi, yakni Rp 4.250 per kilometer. Sementara tarif Grab dan Uber akan ditentukan sesuai kondisi kemacetan, jumlah permintaan dan armada yang tersedia hingga cuaca di suatu wilayah. Dengan adanya batas atas tarif taksi online, uber tak akan bisa menerapkan *surge price* hingga tiga bahkan empat kali tarif normal pada kondisi ramai seperti dulu. Selain itu perusahaan Taksi konvensional Trans Lampung mengenakan tarif buka pintu sebesar Rp 7.000 dan waktu tunggu sesuai kesepakatan akad oleh konsumen. Kedua jenis tarif ini tidak berlaku pada taksi online. Selain itu tarif, tarif minimal yang ditetapkan taksi Trans Lampung sebesar Rp 25.000 sementara tiga perusahaan taksi online Go Car, Grab Car, dan Uber hanya menetapkan tarif minimal Rp 10.000 sekali jalan.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memberikan beberapa catatan terhadap keputusan Kementrian Perhubungan terhadap tarif batas atas dan bawah yang diterapkan untuk taksi online per 1 juli 2017.

Pertama, dengan adanya penetapan tarif ini, diharapkan taksi konvensional yang selama ini beroperasi bisa lebih transparan dalam hal pentarifan kepada para pelanggan. Taksi meter atau konvensional juga harus mengadopsi pola-pola pelayanan taksi aplikasi. Yakni soal transparansi tarif, jarak, tujuan, dan waktu tempuh.

2. Penetapan Argo Secara Umum

Sektor perhubungan adalah sebuah sektor yang menjadi tulang punggung bagi perkembangan ekonomi sebuah negara. Melalui sektor perhubungan maka ekonomi bergerak secara dinamis dari waktu ke waktu. Sistem perhubungan (transportasi) yang baik akan mendorong tumbuhnya ekonomi yang efisien dan berdaya saing. Sebaliknya sistem perhubungan yang buruk dari sebuah negara juga sangat berpengaruh terhadap munculnya ekonomi biaya tinggi di negara tersebut.

Taksi dan angkutan kota merupakan dua jenis angkutan darat di Indonesia, yang perannya sangat melekat kuat dalam keseharian masyarakat perkotaan. Tarif taksi sejak tahun 2005 mengalami perkembangan yang menarik yaitu lahirnya tarif taksi lama. Tarif taksi lama adalah tarif taksi yang lebih rendah dibanding tarif taksi normal yang ditetapkan pemerintah. Tarif taksi lama tidak menggunakan tarif atas bawah dan hanya menggunakan tarif dasar, yang mana tarif dasar tersebut Rp. 3.500/km dan tarif buka pintu Rp. 2.500, sekarang

Pemerintah telah menetapkan tarif yaitu tarif batas atas dan tarif batas bawah, dan tarif tunggu.

Dalam penghitungan penetapan argo secara umum dengan metode Departemen Perhubungan, menunjukkan bahwa tarif yang berlaku sekarang ini tidak relevan lagi untuk digunakan karena tidak dapat menutup biaya operasional yang dikeluarkan oleh pengusaha angkutan taksi.

Penulis melakukan penelitian tentang penetapan tarif taksi di kota Bandar Lampung dengan operasional kendaraan dan tarif angkutan umum yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta tahun 1996.

Untuk mengoptimalkan operasinya, mereka menggunakan jasa telekomunikasi berupa pelayanan pemesanan melalui telepon, yang mana nomor telepon sudah ditempelkan di bagian luar mobil agar konsumen lebih mudah untuk mengetahuinya.

Kebijakan pemerintah dalam penetapan jasa taksi dengan sistem argo harus di perlakukan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

a. Kebijakan Penetapan Argo Taksi

Regulasi tarif angkutan darat nasional, mengatur bahwa tarif untuk angkutan ekonomi ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan tambahan layanan yang diberikan (dalam kelas eksekutif) tarifnya ditetapkan oleh pelaku usaha (PP No. 41 Tahun 1993). Tarif angkutan penumpang tidak dalam trayek kecuali taksi ditetapkan

oleh penyediaan jasa angkutan. Untuk trayek taksi, tarif terdiri, dari tarif awal, tarif dasar, tarif jarak, dan tarif waktu yang ditunjukkan dalam argometer.

Tarif tersebut terdiri dari tarif awal, tarif dasar, tarif jarak, dan tarif waktu yang ditunjukkan dalam argometer. Penetapan tarif taksi ditetapkan oleh Menteri. Regulasi tersebut tidak relevan dengan fakta yang di lapangan, di mana tarif taksi ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat untuk batas atas dan organda untuk batas bawahnya.

Penerapan tarif batas atas oleh pemerintah, selaras dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Kebijakan tersebut dapat menghindari konsumen dari eksploitasi yang mungkin dilakukan oleh produsen memiliki posisi dominan dalam bentuk harga yang terlalu tinggi.

Meskipun prinsip persaingan usaha mentolerir adanya penerapan batas atas oleh pemerintah, tidak demikian halnya dengan penerapan tarif batas bawah. Penerapan batas bawah akan melindungi operator yang tidak efesien untuk tetap dapat berada dalam industri tersebut. Penerapan batas bawah juga dapat merugikan konsumen karena konsumen terpaksa harus membayar harga minimal sebesar tarif batas bawah, meskipun mungkin layanan kurang dari itu. Selain itu penetapan tarif batas bawah akan menyebabkan pelaku usaha yang bisa beroperasi dengan efisien dan bisa melahirkan tarif yang besarnya berada di bawah

tarif batas bawah, maka dia terhambat untuk keunggulan bersaing tersebut. Akibatnya masyarakat kehilangan pilihan tarif murah, secara jangka panjang hal ini akan menimbulkan inefisiensi yang sangat besar.

Sementara itu, terkait dengan penetapan tarif yang dilakukan asosiasi pelaku usaha baik tarif batas maupun tarif batas bawah, maka hal tersebut merupakan bentuk nyata dari kartel yang dipastikan melanggar UU No 5 Tahun 1999 tentang Layanan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penetapan tarif oleh pelaku usaha menghilangkan terjadinya persaingan harga terbaik berdasarkan mekanisme pasar bagi konsumen.

b. Penetapan Pemerintah

Pemerintah memiliki peraturan dalam penetapan tarif taksi, pertama sekali ini yang perlu kita ketahui berapa tarif taksi yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya keputusan Gubernur Lampung menetapkan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi

- a. Menetapkan tarif angkutan orang dengan menggunakan taksi sesuai dengan pelayanan minimal sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini mengenai penetapan tarif angkutan orang dan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek diatur oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

c. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dengan dikemudian hari ternyata dapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor
G/290/V.13/HK/2017 Tanggal 6 Juni 2017

Tabel I

Tarif Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi

No	URAIAN	TARIF
1	Tarif Dasar	Rp. 4.500,- / Km
2	Tarif Batas Atas	Rp. 6.000,- / Km
3	Tarif Batas Bawah	Rp. 3.500,- / Km
4	Tarif Flag Fall/buka pintu	Rp. 7000
5	Tarif Tunggu	Rp. 45.000,- / Jam

Sumber: Data Tribun Lampung 2017

1. Peraturan-Peraturan Tentang Penetapan Argo

a. Peraturan-Peraturan Pemerintah

Dengan adanya taksi online kini peraturan taksi dengan menggunakan argometer dengan taksi online akan disamakan dalam kesetaraan penetapan tarif. Penentuan tarif mengacu pada argo yang sudah ditera (ditetapkan) serta tarif batas atas dan tarif batas bawah.

Tarif penyelenggaraan angkutan sewa dengan aplikasi berbasis teknologi informasi nantinya akan mengikuti aturan taksi konvensional. melalui kebijakan ini pemerintah berupaya untuk menciptakan kesetaraan antara angkutan sewa di bawah aplikasi dengan taksi biasa.

Tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan sewa seperti taksi yang sudah ditera. Dengan begitu nanti harga promo dari aplikasi taksi akan hilang

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek pasal 18 ayat 2 poin c disebutkan, pembayaran tarif sesuai dengan perjanjian antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan.⁷⁰ Taksi online dan taksi yang menggunakan argo kini akan disamaratakan karena dalam UU argo harus jelas, jadi tidak boleh berbeda-beda, Permenhub boleh menentukan namun atas persetujuan pemerintah jika menentukan tanpa adanya persetujuan dari pemerintah, maka itu tidak sah atau tidak diperbolehkan.

Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah (penguasa negara) adalah badan hukum publik yang disengaja diadakan oleh pemerintah untuk kepentingan negara, seperti lembaga-lembaga negara, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Badan hukum ini

⁷⁰ [Http://Lampung.Tribunnews.Com/2016/22/04/Penetapan Taksi](http://Lampung.Tribunnews.Com/2016/22/04/Penetapan%20Taksi). Diakses hari Jumat tanggal 04-06-2017 pukul 22:15.

lazim disebut badan hukum publik.⁷¹ Dengan adanya persetujuan dari pemerintah berarti kendaraan berbasis aplikasi ini dianggap tidak menentukan tarifnya sendiri. Sehingga tidak ada aturan yang dilanggar.

Persetujuan tarif yang sudah ditentukan (pemerintah) ini mengacu pada argo yang sudah ditera, terus kemudian tarif atas dan tarif bawah. Maka tarif kendaraan berbasis aplikasi ini sama dengan taksi biasanya.

Transportasi mobil yang dipakai harus memenuhi persyaratan yang berlaku aman tanpa terkendala dan mesin nya pun layak untuk dipergunakan. Agar konsumen terlindungi dari bahaya.

Pemerintah juga mengatur tentang jarak yang tempuh pada taksi argo, beroperasi dalam kota maupun kepandara. Karna sudah adanya taksi online seperti uber, grab dan gojek maka taksi argo lebih menuju untuk beroperasi di bandara.

Pasal 152 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur bahwa angkutan taksi harus dipergunakan dikawasan perkotaan, kawasan perkotaan ini dapat berada dalam wilayah kota atau kabupaten dalam satu wilayah provinsi dan kawasan perkotaan yang melampaui batas provinsi.

⁷¹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, h. 25

b. Peraturan-Peraturan Pembayaran Argo Menurut Hukum Islam

Pada peraturan perundang-undangan serta kajian Hukum Islam Mengenai peraturan pembayaran argo. Dalam Islam segala bentuk transaksi atau muamalah hendaklah dilakukan atas prinsip keadilan, kejujuran serta keridhoan antara kedua belah pihak. Allah swt berfirman dalam QS. An-Nisa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁷²

Allah swt melarang umat nya untuk melakukan kebohongan atau kecurangan dalam bentuk apapun karena Allah sudah mengatur rezeki umatnya dengan cara yang halal tanpa merugikan sesama umatnya. Allah swt berfirman dalam QS. al Maidah: 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

⁷² Op.Cit., Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.83.

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا
 مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
 وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ
 مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya : “dan Kami telah turunkan kepadamu al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.”⁷³

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 RADEN INTAN
 LAMPUNG

⁷³ *ibid*, h.116

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Paparan Data Profil Perusahaan Taksi Trans Lampung

1. Sejarah Berdirinya Taksi Trans Lampung

PT. Trans Lampung Utama (LJU) merupakan anak usaha dari BUMD (Badan Usaha milik Daerah). PT Lampung Jasa Utama (LJU) yang bergerak dibidang transportasi khususnya bus dan taksi yang wilayah operasional kerja khususnya di Bandara Radin Intan II Lampung dan umumnya di kota Bandar Lampung.

Taksi Trans Lampung didirikan pada tanggal 18 Maret 2017. Kehadiran Taksi Trans Lampung mendapatkan sambutan positif, taksi resmi Bandara Radin Intan II ini di bawah Manajemen BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) PT Trans Lampung Utama.⁷⁴

Berdasarkan SK (surat keterangan) PT Trans Lampung Utama Akte Pendirian No. 05 tanggal 02 Februari 2017 tentang Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006928.AH.01.01. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseorangan Terbatas PT Trans Lampung Utama yang dibuat oleh Notaris Andry Yulian.⁷⁵

Penanggung jawab Perusahaan PT Trans Lampung ini oleh bapak Husni Thamrin sebagai Direktur PT.Taksi Trans Lampung dan bapak Andi Jauhari Yusuf sebagai Direktur PT Lampung Jasa Utama.

⁷⁴ Dedi Kurniawan, Manager Umum Trans Lampung, *wawancara*, tanggal 11 November 2017.

⁷⁵ Ibid, *wawancara* 2017.

Modal dan kekayaan bersih perusahaan yaitu Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunannya.⁷⁶

Bangunan yang didirikan yaitu milik Pemerintah, kegiatan atau jenis usaha yang dijalankan yaitu menjalankan usaha angkutan bus bertrayek, jasa angkutan penumpang dan menjalankan usaha transportasi darat.

Pada awal beroperasi, PT Trans Lampung hanya memiliki 10 taksi, namun saat ini sudah jauh bertambah menjadi 50 armada. Seiring dengan bertambahnya taksi bandara di Lampung. Dan memiliki jumlah supir 70 orang yang sebagian menjadi supir bus Trans Lampung, status kerja supir Trans Lampung yaitu kontrak, jumlah karyawan berjumlah 5 orang Upah kerja karyawan PT Trans Lampung yaitu upah minimum kota (UMK). PT Lampung Jasa Utama selain memiliki perusahaan taksi Trans Lampung juga memiliki usaha bus angkutan umum dan bus pariwisata yang beroperasi di jalur-jalur tertentu dan bus pariwisata juga bisa disewa untuk pengangkutan pariwisata.⁷⁷

Bus Trans Lampung memiliki 5 angkuta yang bisa dioprasikan dan memiliki 10 supir utama dan sebagiannya supir pengganti yang beroperasi dari jam 07.30 sampai jam 17.00 selesai.⁷⁸

⁷⁶ Ibid, wawancara, 2017.

⁷⁷ Ibid, wawancara, 2017.

⁷⁸ Ibid, wawancara, 2017.

2. Visi, Misi Taksi Trans Lampung

Visi Taksi Trans Lampung yaitu untuk menjadikan mode transportasi dan menjadi perusahaan yang mampu bertahan dan mengedepankan kualitas untuk memastikan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi para stakeholder.

Misi Taksi Trans Lampung bertujuan untuk mencapai kepuasan pelanggan, dan mengembangkan serta mempertahankan diri sebagai pemimpin pasar disetiap kategori yang kita masuki. Dalam transportasi darat kita menyediakan layanan yang handal.⁷⁹

3. Logo Taksi Trans Lampung

Logo yang di sahkan pada PT Trans Lampung Utama



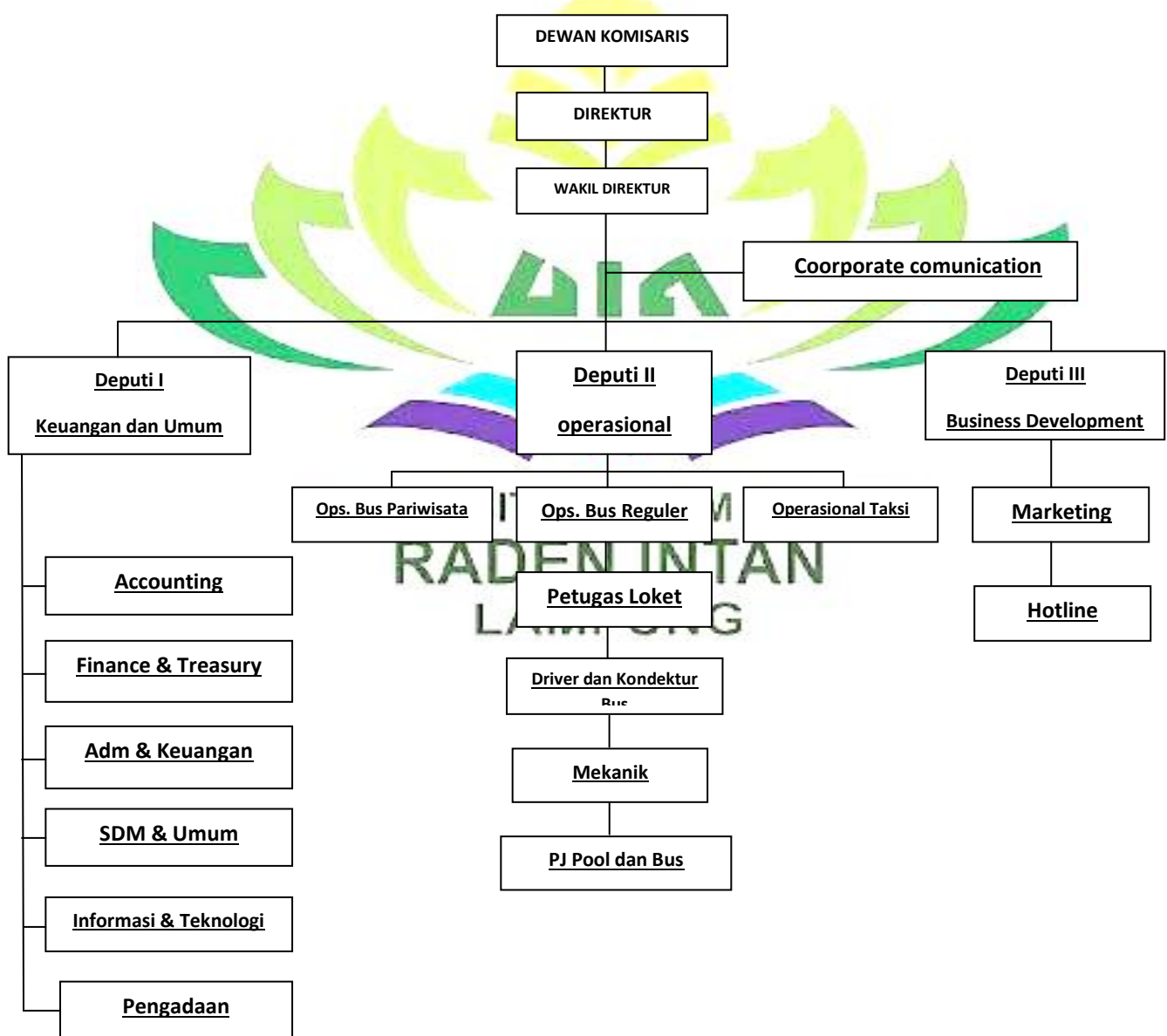
Sumber: Logo Perusahaan Taksi Trans Lampung, Lampung Jasa Utama 2017

⁷⁹ Ibid, wawancara, 2017.

4. Struktur Organisasi PT Trans Lampung

Taksi Trans Lampung memiliki struktur kepemimpinan

STRUKTUR ORGANISASI PT TRANS LAMPUNG UTAMA



Sumber: Kantor Lampung Jasa Utama Taksi Trans Lampung 2017

5. Lokasi Perusahaan

Taksi Trans Lampung berlokasi di alamat Jalan. Jendral Sudirman No. 81 Rt. 02 Lingkungan I. Kelurahan Tanjung Raya Kecamatan Kedamaian Provinsi Lampung Status bangunan yang didirikan milik Pemerintah dan diperuntukan bangunan sebagai kantor.

PT Trans Lampung memiliki luas bangunan 20m x 30m dan memiliki dua lantai ruang kerja bagian lantai bawah sebagai tempat loket untuk pemesanan taksi dan bus dan terdapat ruang tunggu, di bagian lantai atas terdapat ruangan bagian administrasi keuangan serta bagian ruang kepada manager perusahaan taksi Trans Lampaung. Dimana bagian parkir seluas 15m x 10m dan PT Trans Lampung memiliki 10 ruangan untuk pegawai.

6. Produk atau Mobil/Kendaraan yang Dipakai

Type Mobil : Toyota Limo

Panjang : 4,41 meter

Lebar : 1,7 meter

Tinggi : 1,475 meter

Mesin : DOHC Dual WT

Bahan Bakar : Bensin

B. Penetapan Tarif Argo pada Taksi Trans Lampung

Taksi bandara yang dioperasikan oleh PT Taksi Lampung Utama memakai argo untuk tarifnya. Taksi Trans Lampung memasang tarif buka

pintu Rp.7000 dan hanya Rp.450 per 100 meter, dan tarif minimal Rp.25.000, Manajemen Lampung Taksi Utama menjamin tarif argo mereka sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan SK (surat keterangan) PT Trans Lampung akte Pendirian No. 05 tanggal 02 Februari 2017 tentang keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006928.AH.01.01. tahun 2017 tentang pengesahaan pendirian badan hukum perseorangan terbatas PT Trans Lampung Utama yang dibuat oleh Notaris Andry Yulian.⁸⁰ Skema tarifnya seperti yang umum berlaku di kota-kota besar di Indonesia. Cara pemasangan argo pada taksi Trans Lampung yaitu argo meter mengambil pulsa output dari sensor yang tersensor pada roda kendaraan, pulsa tersebut akan dihitung dan dikonversi menjadi jarak tempuh dalam satuan kilometer. Parameter kedua adalah waktu pada saat roda tidak berputar argo meter akan menghitung waktu tunggu sampai dengan terdeteksi adanya putaran roda kembali. Penetapan harga argo pertama kali dibuat oleh pemerintah dan disahkan oleh Gubernur Lampung, harga argo yang dibuat oleh pemerintah Lampung pertama kali yaitu tarif dasar Rp.4.500,- /km tarif batas atas Rp.6.000,-/ km tarif batas bawah Rp.3.500,-/km tarif buka pintu Rp.7000 Tarif Tunggu Rp.45.000,- / Jam.⁸¹

Pada Taksi Trans Lampung apabila taksi berhenti maka hitungan argonya pun berhenti dan dimatikan oleh supir dan apabila konsumen meminta untuk droff-off barang maka itungan argonya pun tetap berjalan

⁸⁰ Dedi Kurniawan, Manager Umum Trans Lampung, *wawancara*, tanggal 11 November 2017

⁸¹ Kepala Kantor Lampung Jasa Utama, *wawancara*, tanggal 11 November 2017.

dalam argo tidak ada kesepakatan antar supir dan konsumen tentang negosiasi harga tetapi harus berdasarkan surat operasional tidak dengan kesepakatan tapi harus berdasarkan argo yang telah berjalan dan telah ditetapkan sebelumnya. Apabila supir melanggar maka akan dikenakan surat peringatan 1-3 kali dan apabila masih melanggar akan di PHK oleh pihak perusahaan.⁸²

Taksi Trans Lampung mewajibkan supir untuk membayar iuran wajib kepada perusahaan sebesar Rp.250.000 per bulan, dan setiap harinya supir harus mencapai target pendapatan Rp.250.000 per harinya. Pihak taksi bekerjasama dengan pihak bandara, dan taksi trans pun beroperasi 24 jam setiap harinya.

Setiap harinya supir taksi Trans Lampung wajib memberikan laporan tentang keuangan pendapatan setiap harinya yang harus di laporkan ke perusahaan apakah penghasilnya mencapai target yang telah ditetapkan.

Cara pemesanan Taksi Trans Lampung yaitu bisa dengan menggunakan via telepon, dan *costumer service* akan menjelaskan prosedur tariff pembayaran taksi dan konsumen akan dijemput sesuai alamat yang telah diberikan oleh taksi sesuai waktu yang telah ditentukan konsumen⁸³

1. Hasil wawancara tanggapan konsumen tentang taksi Trans Lampung

⁸² Ibid, wawancara, 2017.

⁸³ Ibid, wawancara, 2017

Berdasarkan praktik yang terjadi di lapangan ada beberapa tanggapan yang diperoleh dari konsumen tentang pembayaran jasa taksi dengan sistem argo yaitu:

Indah adalah warga kota Bandar Lampung yang bertempat tinggal di jalan Endro Suratmin kecamatan sukarama, ketika Indah sedang berjalan-jalan bersama keluarganya dari Jakarta menuju Lampung Indah menggunakan Pesawat dan berhenti di bandara Radin Intan II, sesudah sampai nya di bandara, Indah bersama keluarganya memilih untuk menggunakan transportasi taksi Trans Lampung untuk menuju kerumahnya, sesampai di dalam taksi supir pun memberi informasi tentang sistem pembayaran tarif taksi yaitu dengan adanya tarif minimal Rp. 25.000 dan tarif buka pintu Rp. 7.000 dan hanya Rp. 450 per 100 meter.

Setelah supir memberi informasi Indah melakukan perjalananya, ketika sampai di natar Indah berhenti di rumah makan untuk membeli makanan, seketika supir langsung meminta tarif tunggu kepada Indah padahal sebelumnya supir tidak menjelaskan sistem tarif tunggu dan memang tidak adanya peraturan yang dibuat oleh taksi Trans Lampung tentang tarif tunggu, tetapi ketika di lapangan supir melakukan sistem tarif tunggu dan meminta sesuai kesepakatan apabila konsumen ingin berhenti sebentar, dan Indah membayar Rp. 75.000 untuk tarif tunggu tersebut.⁸⁴

2. Hasil wawancara peneliti kepada supir taksi Trans Lampung

⁸⁴ Indah, konsumen taksi Trans Lampung, wawancara, tanggal 6 November 2017

Bapak Andri adalah supir taksi Trans Lampung bapak Andri sudah lama bekerja sebagai supir selama 9 bulan, selama bekerja menjadi supir Trans Lampung bapak Andri lebih memilih beroperasi di bandara Radin Intan II karena menurut pak Andri penghasilan yang di peroleh lebih banyak di banding beroperasi di dalam kota.

Peneliti menanyakan tentang tarif yang dilakukan oleh supir kepada konsumen apakah sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan, pak Andri menjawab bahwa peraturan tentang tarif pembayaran sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan taksi Trans Lampung, tetapi kalo di lapangan mengapa ada sistem tarif tunggu sedangkan pada pihak perusahaan tidak mengadakan tarif tunggu, pak Andri menjawab sebenarnya tidak semua supir melakukan sistem tarif tunggu, itu hanya untuk seseran para supir saja.⁸⁵

3. Hasil wawancara peneliti kepada Manager Umum Trans Lampung

Dedi kurniawan adalah manager keuangan PT Trans Lampung pak Dedi menjelaskan tentang pengaduan/keluhan konsumen terhadap supir taksi Trans Lampung, konsumen mengeluh adanya keterlambatan dalam penjemputan dan kurang tersedianya taksi Trans Lampung di dalam kota, sehingga penumpang harus menunggu sekitar 1 jam untuk bisa menaiki taksi, sedangkan moto taksi Trans Lampung yaitu cepat, dan tepat waktu.

Peneliti menanyakan kepada pak dedi apakah ada kecurangan dalam sistem argo? Jawabannya yaitu mungkin ada kecurangan tersebut

⁸⁵ Andri, Supir taksi Trans Lampung, wawancara, tanggal 10 November 2017

tetapi pihak perusahaan tidak mengetahui nya karena belim ada pengaduan tentang kecurangan saat di lapangan, jika ada yang bertanya tentang kecurangan dalam memainkan argo mungkun itu ada tetapi pada oknum supir yang tidak bertanggung jawab. Pada pihak perusahaan sudah memasang argo dengan ketentuan tarif yang sudah ditetapkan.

Apabila kecurangan pada supir diketahui oleh pihak perusahaan, perusahaan akan bertanggung jawab atas ketidak nyamanan dan kerugian konsumen dan akan member sanksi kepada supir tersebut.⁸⁶



⁸⁶ Dedi Kurniawan, Manager Umum Trans Lampung, *wawancara*, tanggal 11 November 2017.

BAB IV **ANALISIS DATA**

A. Sistem Penetapan Argo Pada Taksi Trans Lampung

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dilapangan seperti yang telah dipaparkan pada BAB III merujuk BAB II sebagai landasan Praktek pembayaran jasa taksi dengan sistem argo di Taksi Trans Lampung di Bandar Lampung, adalah para supir tidak melakukan akad yang jelas terhadap konsumen. Seharusnya praktek akad ini harus dilakukan oleh supir kepada konsumen agar tidak terjadinya perselisihan. Dan dalam peraturan angkutan taksi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah tentang peraturan tarif tunggu yang tidak dilaksanakan oleh Taksi Trans Lampung tetapi dilakukan oleh supir melakukan penentuan dan meminta tarif tunggu kepada konsumen sehingga penumpang terasa dirugikan.

Peraturan penetapan tarif taksi Trans Lampung tidak sesuai dengan tarif penetapan yang telah dibuat oleh peraturan pemerintah provinsi Lampung, di mana tarif yang telah dibuat oleh pemerintah menggunakan tarif tunggu dan tidak menggunakan tarif minimal, sedangkan pada taksi Trans Lampung menggunakan tarif minimal dan tidak menggunakan tarif tunggu.

Taksi Trans Lampung memasang penetapan tarif buka pintu Rp.7000 dan hanya Rp.450 per 100 meter dan tarif minimal Rp.25.000 Manajemen Lampung Taksi Utama menjamin tarif argo mereka sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan SK (surat keterangan) PT Trans Lampung akte Pendirian No. 05 tanggal 02 Februari 2017 tentang

keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006928.AH.01.01. tahun 2017 tentang pengesahaan pendirian badan hukum perseorangan terbatas PT Trans Lampung Utama yang dibuat oleh Notaris Andry Yulian.⁸⁷

Dedi Kurniawan Kepala Manager Umum dan Keuangan PT Trans Lampung Utama menjelaskan tentang keluhan konsumen terhadap perilaku pengemudi supir taksi Trans Lampung yaitu:

1. Bapak Dedi Kurniawan mengatakan Adanya kecurangan dalam memainkan argo pada supir yang tidak bertanggungjawab. Sehingga konsumen merasa dirugikan oleh pihak perusahaan karena kecurangan yang telah dilakukan oleh supir. Tetapi dari pihak perusahaan sudah memasang argo dengan ketentuan tarif yang sudah ditetapkan.
2. Pada Perusahaan Taksi Trans Lampung tidak memberikan tarif tunggu tetapi supir memberikan peraturan tarif tunggu sehingga konsumen merasa dirugikan
3. Adanya keterlambatan dalam penjemputan, dan kurang tersedianya Taksi Trans lampung di dalam kota, sehingga penumpang harus menunggu sekitar 1 jam untuk bisa menaiki taksi.
4. Peraturan sistem tarif pembayaran argo pada taksi Trans Lampung tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang tarif dasar dan tarif bawah.

⁸⁷ Dedi Kurniawan, Manager Umum Trans Lampung, *wawancara*, tanggal 12 November

Masalah atau keluhan-keluhan tersebut di atas, PT Trans Lampung Utama telah berupaya untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang akan merugikan konsumen dengan memberikan teguran kesupir/pengemudi taksi sehingga terjadinya gharar dalam pembayaran.

PT Trans Lampung seharusnya membuat peraturan tarif tunggu yang mana telah dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah Lampung dan telah disahkan oleh Gubernur Lampung atas tariff tunggu pengguna jasa taksi, sehingga supir/pengemudi tidak seenaknya meminta tarif tunggu kepada konsumen/penumpang sehingga dapat merugikan konsumen. Perusahaan harus lebih kondusif dalam peraturan tarif pembayaran jasa pengguna taksi khususnya di Bandar Lampung harus sesuai dengan peraturan hukum Islam tentang cara pembayaran yang jelas dan transparan sehingga tidak terjadinya gharar dalam pembayaran.

Apabila ada konsumen yang mengeluh tentang keterlambatan penjemputan di tempat yang ditentukan, maka sepenuhnya bukan kesalahan pengemudi. Keterlambatan penjemputan bisa disebabkan oleh faktor macet dan kurangnya unit yang beroperasi disekitar tempat penjemputan, maka pihak taksi Trans Lampung mengharapkan pengertian dari konsumen terhadap sesuatu yang tidak bisa dihindari ini.

Menurut penulis, tanggung jawab perusahaan pengangkutan atas kerugian konsumen terhadap perilaku pengemudi yang tidak mengikuti standar peraturan dari taksi Trans Lampung mengacu pada tanggungjawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakan.

Hal ini juga relevan dengan hasil wawancara dari pihak taksi trans Lampung, dapat disimpulkan bahwa pihak taksi Trans Lampung lebih memilih langkah damai atau secara kekeluargaan yang ditempuh dalam menyelesaikan sengketa antara supir dan penumpang.

Ketentuan di atas secara tegas mengatur bahwa penyelesaian sengketa konsumen terhadap kecurangan dalam pembayaran argo pada oknum supir yang tidak bertanggungjawab dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau cara damai serta penyelesaian sengketa melalui pengadilan (non-litigasi).

Pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi warga negaranya untuk dapat melakukan kegiatan transportasi sejalan dengan tujuan Negara yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dan untuk menjamin terselenggarakannya pengangkutan yang baik dan adil bagi masyarakat maka pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penumpang.

Untuk menjamin perlindungan hukum terhadap penumpang, maka pemerintah mengeluarkan suatu peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu, mewujudkan etika berlalu-lintas dan budaya bangsa, dan mewujudkan penegakkan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat yaitu undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Jasa Taksi Pada Taksi Trans Lampung

Jasa taksi adalah boleh menurut hukum Islam. Penyediaan jasa taksi perlu izin kepada Negara yang melakukan usaha jasa taksinya sebagaimana jual beli dan media masa. Tiap pekerjaan yang halal, maka hukum mengontraknya adalah **halal** pula. Sehingga transaksi tersebut boleh dilakukan. Syarat sah dan tidaknya sanksi tersebut adalah bahwa jasa dalam kontrak adalah jasa yang mubah. Tidak diperbolehkan mengadakan kontrak untuk melakukan jasa yang diharamkan. Sehingga, tidak diperbolehkan mengadakan kontrak jasa untuk mengangkat minuman keras, dan tidak adanya kecurangan dalam pembayaran dan akad yang telah disepakati dan tidak merugikan orang lain. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat : 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْكَلْبَتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram,

jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak bias hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain, salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkungan muamalah ialah upah-mengupah, yang dalam fiqh islam disebut *ijarah*. Penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah salah satu transaksi dalam bermu'amalah dalam Islam, yang berisi penukaran jasa dan dapat diambil pemanfaatannya.

Pembayaran menggunakan sistem argo tidak sesuai dengan hukum Islam yang telah ditetapkan dengan tarif pembayaran yang jelas dan transparan sehingga tidak terjadinya gharar dalam suatu pembayaran.

Pengertian di atas jelas bahwa pembayaran merupakan suatu cara untuk memenuhi suatu kewajiban tertentu dengan mengeluarkan uang baik secara tunai atau melalui penyerahan harta dalam bentuk jasa.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari seluruh bahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai tinjauan hukum Islam tentang pembayaran jasa taksi dengan sistem argo pada taksi Trans Lampung, di Bandar Lampung dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem penetapan argo pada taksi Trans Lampung memasang tarif buka pintu Rp. 7000 dan hanya Rp. 450 per 100 meter dan tarif minimal Rp. 25.000 perjalanan dalam kota atau ke bandara yang telah ditetapkan sesuai SK (surat keterangan). PT Trans Lampung Utama akte pendirian No. 05 tanggal 02 februari 2017 tentang Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006928.AH.01.01. yang telah disahkan oleh notaris Andry Yulian, S.H. PT. Taksi Trans Lampung seharusnya membuat peraturan tarif tunggu yang mana telah dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah lampung dan telah disahkan oleh Gubernur Lampung atas tarif tunggu pengguna jasa taksi, sehingga supir/pengemudi tidak seenaknya meminta tarif tunggu kepada konsumen/penumpang sehingga dapat merugikan konsumen. Perusahaan harus lebih kondusif dalam peraturan tarif pembayaran jasa pengguna taksi khususnya di Bandar Lampung sesuai dengan peraturan hukum islam yang telah ditetapkan tentang tarif pembayaran yang jelas dan transparan sehingga tidak terjadinya gharar dalam pembayaran.

2. Tinjauan hukum Islam penetapan argo yang dilakukan taksi Trans Lampung tidak sesuai dengan peraturan penetapan yang telah dibuat oleh pemerintah Lampung, seharusnya taksi Trans Lampung mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah Lampung tentang tarif angkutan taksi tentang penetapan harga argo yang dibuat oleh Gubernur Lampung, agar tidak adanya kecurangan dalam melakukan suatu akad pembayaran dan tidak terjadinya *gharar* dalam pembayaran dengan sistem argo pada taksi Trans Lampung dalam hukum Islam, karena Islam melarang adanya *Gharar* dalam suatu bisnis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka mengajukan saran-saran yaitu:

1. Tanggungjawab dan bentuk pelayanan yang telah lama dilakukan PT. Trans Lampung Utama harus ditingkatkan lagi demi kenyamanan konsumen pengguna jasa taksi dan tidak adanya kecurangan lagi dalam pembayaran tarif taksi dan konsumen lebih teliti dalam penggunaan jasa taksi dan adanya tarif tunggu.
2. Sebaiknya pihak perusahaan PT. Taksi Trans Lampung Utama lebih memberikan pengawasan dan *training* yang lebih baik lagi serta selalu memberikan sanksi yang tegas kepada pengemudi agar lebih takut dan patuh dan tidak adanya kecurangan saat pengemudi beroperasi dilapangan.

3. DAFTAR PUSTAKA

4. Adji Usman, Djoko Prakoso; dan Hari Pramono, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Cet 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
5. Anwar Samsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori akad Dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
6. An-Nabhani Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).
7. Arikanto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
8. Basya, *Mursyid al-Hairan*, (Kairo: Dar al-Furjani, 1403/1983)
9. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2002).
10. Gultom Elfridsa, *Hukum Pengangkutan Darat*, (Jakarta: Literata Lintas Media 2009).
11. H. S Salim, *Hukum Kontrak (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafindo 2003).
12. Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2003).
13. [Http://Lampung. Tribunnews.Com/2016/22/04/Penetapan Taksi](http://Lampung.Tribunnews.Com/2016/22/04/Penetapan%20Taksi). Diakses hari Jumat tanggal 04-06-2017 pukul 22:15.
14. Jafar Khumaedi, *Hukum Perdata Islam*, (Lampung: Permatanet Publishing, 2016).
15. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi 11, Balai Pustaka, 1991
16. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Pembayaran" (Online) tersedia di <http://kbbi.web.id/pembayaran>, diakses pada 11 april 2016.
17. Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*, Al-Maida, <http://www.ibnukatsironline.com/>
18. Muhammad, abdukkadir, *Hukum Pengangkutan Naga*, Bandung: Citra Aditya 2009.
19. -----, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung; PT Citra Aditya Bakri, 2014)
20. Narbuko, Cholid, H. Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
21. Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Gaya Media Pratama, 2007)
22. Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).
23. -----, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalih Indonesi, 2011).
24. Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Penerbit Dana Bakti Wakaf).
25. Raco, JR, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulan* Jakarta: Grafindo, 2008.
26. Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, Bandung: CV.Pustaka Setia, Cet Ke-1, 2008.
27. Sahrani sohari dan Ru'Fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
28. Saleh, Noer Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi*, Jakarta: Gunung agung, 1989.

29. Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet Ke-1, 2008.
30. Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Adi Mahasatya, 2007, Cet Ke-5
31. Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
32. Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Jakarta: Interimas, 1985.
33. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung Alfabeta, Cet Ke-13, 2011.
34. Suhendi Hendri, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014).
35. Syafei H. Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung; Pustaka Setia, 2001).
36. *Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan*, (Jakarta: BP. Cipta Jaya, 2003).

